

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Disusun Oleh:

NAMA : TRI HARYANTO
NPM : 2241021035
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

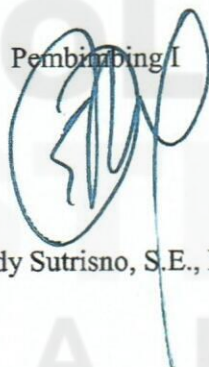
**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Tri Haryanto
NPM : 2241021035
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Implementasi Kebijakan Transformasi
Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah
Istimewa Yogyakarta
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Implementation of Social Inclusion Based
Library Transformation Policies in The Special
Region of Yogyakarta*

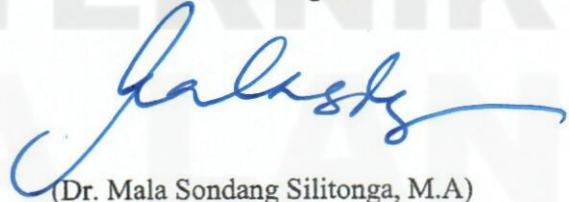
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si)

Pembimbing II



(Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

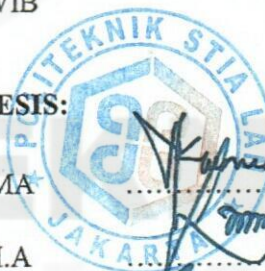
NAMA : TRI HARYANTO
NPM : 2241021035
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFORMASI
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juni 2024
Pukul : 09-10.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA
Sekretaris : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A
Anggota : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd
Pembimbing 1 : Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si
Pembimbing 2 : Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A



Handwritten signatures of the examiners and supervisors, including the Ketua Sidang, Sekretaris, Anggota, and Pembimbing 1 & 2, written in blue ink over the official stamp.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tri Haryanto
NPM : 2241021035
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tesis yang telah saya buat ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 11 Juni 2024



Tri Haryanto

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang indah selain ungkapan syukur yang mendalam pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala bimbingan dan ridho-Nya, sehingga peneliti dapat berkesempatan dan berkemampuan menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta.”

Suka-duka sungguh-sungguh saya alami dalam menyelesaikan tesis ini, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan penulis sebelumnya. Namun, peneliti menyadari bahwa kesemuanya itu merupakan suatu proses pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi diri peneliti dalam meningkatkan pengetahuan. Peneliti menyadari bahwa tesis ini tidak akan pernah selesai bila tanpa bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini hingga dapat terselesaikan, terutama kepada:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A, yang telah menyediakan berbagai fasilitas pembelajaran guna mendukung semua proses pembelajaran selama kurang lebih dua tahun.
2. Ketua Jurusan Administrasi Publik, Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si, atas berbagai fasilitas pembelajaran guna mendukung pembelajaran di jurusan administrasi publik selama kurang lebih dua tahun.
3. Ketua Prodi Administrasi Pembangunan Negara Program Magister Terapan, Bapak Dr. Asropi, S.Ip, M.Si, atas arahan, fasilitasi dan bimbingan kepada penulis dalam kedudukan sebagai Ketua Prodi Administrasi Pembangunan Negara Program Magister Terapan.
4. Bapak Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si dan Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A, sebagai pembimbing I dan II atas segala saran, bimbingan dan nasihatnya selama penelitian berlangsung dan selama penulisan Tesis ini.

5. Bapak Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA, Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A, Bapak Dr. Bambang Giyanto, M.Pd sebagai dosen pembahas dan penguji atas segala saran dan masukannya dalam penulisan Tesis ini.
6. Istri dan anak-anak ku tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi ayah dalam penyusunan Tesis ini hingga selesai.
7. Rekan-rekan kerja sejawat di Kemenko PMK RI, teman-teman seperjuangan di program pascasarjan dan pihak-pihak lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan ide dan diskusi untuk kesempurnaan penyusunan naskah Tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan Tesis ini. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan saran, masukan dan penelitian lanjutan untuk perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini.

Jakarta, 11 Juni 2024

Peneliti,

Tri Haryanto

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tri Haryanto, Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si, Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A

tri.haryanto@kemenkopmk.go.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) bertujuan untuk meningkatkan literasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun peningkatan literasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menganalisis faktor determinan penyebab adanya gap literasi yang tinggi namun tingkat kesejahteraan masyarakat rendah, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dengan memodifikasi model Van Meter dan Van Horn dengan menambahkan variabel pemanfaatan teknologi dan partisipasi masyarakat dalam kerangka metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman DIY. Adapun hasil penelitian yang diperoleh ada beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi TPBIS di kedua kabupaten tersebut antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya organisasi, komunikasi antarorganisasi dan pengukuran aktivitas, karakteristik birokrasi pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, pemanfaatan teknologi, partisipasi masyarakat, sikap pelaksana dan kinerja kebijakan. Agar implementasi TPBIS sesuai arah dan tujuan kebijakan maka strategi yang dapat digunakan antara lain peningkatan komitmen pimpinan, penyusunan regulasi, pembentukan tim koordinasi, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) serta evaluasi dan monitoring secara berkala.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Literasi, Transformasi, Inklusi Sosial, Perpustakaan, TPBIS.

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

ABSTRACT

Implementation of Social Inclusion Based Library Transformation Policies in The Special Region of Yogyakarta

Tri Haryanto, Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si, Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A

tri.haryanto@kemenkopmk.go.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

The Social Inclusion-Based Library Transformation (TPBIS) program aims to increase literacy in realizing community welfare, but increasing literacy in The Special Region of Yogyakarta (DIY) is not followed by an increase in community welfare. To analyse the determinant factors that cause high levels of literacy but low levels of community welfare, the researcher used a policy implementation model with the Van Meter and Van Horn model by adding the variables of technology use and community participation within the framework of qualitative research method with a case study approach in Kulon Progo regency and Sleman regency, DIY. As for the research results obtained, there are several variable that influence the implementation of TPBIS in the two districts above, including policy standards and targets, organizational resources, inter-organizational community and activity measurement, characteristics of the implementing bureaucracy, socio-economic and political conditions, use of technology and community participation, attitude of implementers and policy performance. So that the implementation of TPBIS is in line with policy direction and objectives, strategies that can be used include increasing leadership commitment, drafting regulations, forming a coordination team, implementation National Action Plan (RAN) and Regional Action Plan (RAD) as well as regular evaluation and monitoring.

Key words: Policy implementation, Literacy, Transformation, Social Inclusion, Library, TPBIS.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR ISI

LEMBAR HALAMAN JUDUL TESIS	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Rumusan Permasalahan	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Akademis	11
2. Manfaat Praktis	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	17
1. Tinjauan Kebijakan	17
2. Tinjauan Teoritis	19
a. Teori Administrasi Publik	19

b. Teori Kebijakan Publik	23
c. Teori Implementasi Kebijakan	25
d. Teori Perpustakaan	40
e. Teori TPBIS	42
f. Konsep Kunci Penelitian.....	43
C. Kerangka Berpikir	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Metode Penelitian	47
B. Teknik Pengumpulan Data	47
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
D. Prosedur Validasi Model	52
E. Instrumen Penelitian	53
BAB IV HASIL PENELITIAN	54
A. Lokus Penelitian	54
B. Hasil Penelitian	57
C. Pembahasan	63
1. Faktor Determinan Mempengaruhi Implementasi Kebijakan TPBIS di DIY	63
2. Strategi Implementasi Kebijakan TPBIS di DIY	98
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	111
A. Simpulan	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jumlah Perpustakaan di Indonesia Tahun 2022	4
Gambar 2.	Kekuatan Sinyal Telepon Seluler dan Sinyal Internet di Kelurahan/Desa	5
Gambar 3.	Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Horn	26
Gambar 4.	Implementasi Kebijakan Model Edward III	28
Gambar 5.	Implementasi Kebijakan Model Grindle	29
Gambar 6.	Implementasi Kebijakan Model Mazmanian-Sabatier	30
Gambar 7.	Desain Penelitian	34
Gambar 8.	Kerangka Berpikir	46
Gambar 9.	Desain Analisis Data	51
Gambar 10.	Sebaran Implementasi Kebijakan TPBIS	54
Gambar 11.	DAK Sub Bidang Perpustakaan Daerah	55
Gambar 12.	Analisis <i>Word Cloud Frequency</i>	59
Gambar 13.	Analisis <i>Word Cloud Frequency</i>	61
Gambar 14.	Analisis <i>Cluster Query</i>	62
Gambar 15.	Kegiatan Bedah Buku di DIY.....	69
Gambar 16.	Peneliti Mewawancarai Kadis DPK Kab Kulon Progo	71
Gambar 17.	Bentuk Pelaksanaan Bedah Buku Bagi Masyarakat	80
Gambar 18.	Bentuk Mobil dan Motor Perpustakaan Keliling	81
Gambar 19.	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat melalui Sedekah Buku...	86
Gambar 20.	Sosialisasi Program TPBIS Kabupaten Kulon Progo	88
Gambar 21.	Koordinasi Pelaksana TPBIS Pemerintah Pusat-Daerah ...	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kemampuan Membaca Negara ASEAN (PISA 2018)	3
Tabel 2.	Indikator Literasi dan Angka Kemiskinan di Jawa	8
Tabel 3.	Hasil <i>Review</i> Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.	Kelebihan dan Kekurangan Empat Teori Implementasi	31
Tabel 5.	Penelitian Terdahulu dengan Teori Van Meter Horn	33
Tabel 6.	Informan Kunci Penelitian	50
Tabel 7.	Rekapitulasi Data Perpustakaan di Indonesia	55
Tabel 8.	Statistik Sosial Demografi Lokus Penelitian	56
Tabel 9.	Tanggung-jawab Tim Koordinator Program TPBIS	104
Tabel 10.	Tim Sinergi Program TPBIS	107



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Anotasi Data Key informan 1
- Lampiran 2. Anotasi Data Key informan 2
- Lampiran 3. Anotasi Data Key informan 3
- Lampiran 4. Anotasi Data Key informan 4
- Lampiran 5. Anotasi Data Key informan 5
- Lampiran 6. Anotasi Data Key informan 6
- Lampiran 7. Anotasi Data Key informan 7
- Lampiran 8. Anotasi Data Key informan 8
- Lampiran 9. Anotasi Data Key informan 9
- Lampiran 10. Anotasi Data Key informan 10
- Lampiran 11. Anotasi Data Key informan 11



BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Kisah sukses Mark Zuckerberg, Elon Musk, Warren Buffet, Jeff Besos, Bill Gates, Mark Cuban, dan Oprah Winfrey diawali dari kegemaran membaca. Zuckerberg Chief Executive Officer (CEO) Facebook membiasakan membaca satu buku dalam dua minggu untuk memperoleh informasi terkait teknologi, kebudayaan, sejarah, hingga kepercayaan. Warren Buffett meluangkan waktu membaca lima koran berbeda dan memeriksa 500 halaman dokumen finansial selama 5-6 jam sehari. Elon Musk menghabiskan waktu sekitar 10 jam sehari untuk membaca novel bergenre *science-fiction*, bahkan pengetahuan yang luas tentang roket diperoleh dari membaca buku (Gramedia, 2018).

Literasi termasuk dalam bagian Deklarasi Hak Asasi Manusia (1946). Oleh sebab itu, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menempatkan literasi sebagai misi utamanya. Hal ini diperkuat UNESCO melalui Deklarasi Persepolis 1975 serta Deklarasi Pendidikan Untuk Semua atau EFA 1990 (UNESCO, 1990). Deklarasi Hamburg tentang Pembelajaran Orang Dewasa dikeluarkan UNESCO pada Tahun 1997. Resolusi nomor 11 deklarasi tersebut menyatakan bahwa “literasi, secara luas mengandung pengetahuan dan kemampuan dasar yang dibutuhkan oleh semua orang dalam dunia yang cepat berubah, merupakan hak manusia yang fundamental” (UNESCO, 1997).

Masyarakat yang memiliki tingkat literasi tinggi merupakan modal menghadapi berbagai tantangan pada era digital. Otomatisasi yang berdampak pada hilangnya beberapa pekerjaan, serta munculnya berbagai pekerjaan baru mendorong pemerintah untuk mempercepat adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan budaya literasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, inovasi, dan kreativitas masyarakat agar masyarakat lebih berdaya (Narasi RPJMN 2020-2024)

Walaupun literasi merupakan faktor penting dalam peningkatan pengetahuan masyarakat, namun berbagai indikator literasi global menempatkan Indonesia pada posisi yang relatif rendah. Beberapa indikator literasi global yang sering digunakan untuk mengukur tingkat literasi adalah *Progress in International Reading Literacy Studies* (PIRLS), *Programme for International Student Assessment* (PISA) dan *The Programme for International Assessment of Adult Competencies* (PIAAC). PIRLS diadakan sejak tahun 2001. Pengukuran PIRLS dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Pendidikan (NCES) Amerika Serikat setiap lima tahun sekali. PIRLS menguji kemampuan membaca siswa SD kelas 4 dan kuesioner tentang sikap siswa terhadap membaca dan kebiasaan membaca. Kuesioner juga diberikan kepada para tenaga pendidik dan kepala sekolah untuk memperoleh informasi terkait pengalaman siswa dalam mengembangkan literasi membaca di sekolah. Indonesia hanya sekali mengikuti PIRLS pada tahun 2011, dimana posisi Indonesia pada peringkat 42 dari 45 negara.

PISA merupakan program *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) setiap 3 tahun untuk mengukur kemampuan pelajar yang berusia 15 tahun dalam menggunakan pengetahuan dan kemampuan membaca, matematika dan sains untuk menghadapi tantangan kehidupan nyata. Kemampuan membaca, sains, dan matematika siswa Indonesia lebih rendah dari rata-rata OECD pada PISA Tahun 2018. Jumlah siswa yang mampu mengidentifikasi gagasan utama, menemukan informasi eksplisit, serta dapat merefleksikan tujuan dalam teks dengan panjang sedang baru mencapai 30% sedangkan rata-rata OECD adalah 77%. Posisi Indonesia dalam kemampuan membaca siswa berada pada peringkat ke-70 dari 78 negara. Kemampuan membaca Indonesia pada PISA 2018 lebih rendah dari Singapura, Malaysia, Brunei Darusalam, dan Thailand seperti terlihat pada Tabel 1. Kecakapan literasi, numerasi dan pemecahan masalah warga dewasa berdasarkan hasil asesmen PIAAC Tahun 2016, menyebutkan bahwa warga dewasa Indonesia juga menduduki peringkat terbawah dari 35 negara.

Tabel 1 Kemampuan Membaca Negara ASEAN pada PISA 2018

No	Negara	Skor	Peringkat
1.	Singapura	551	2
2.	Malaysia	438	48
3.	Brunei Darussalam	431	50
4.	Thailand	426	55
5.	Indonesia	396	70
6.	Filipina	357	77

Sumber: OECD, 2019.

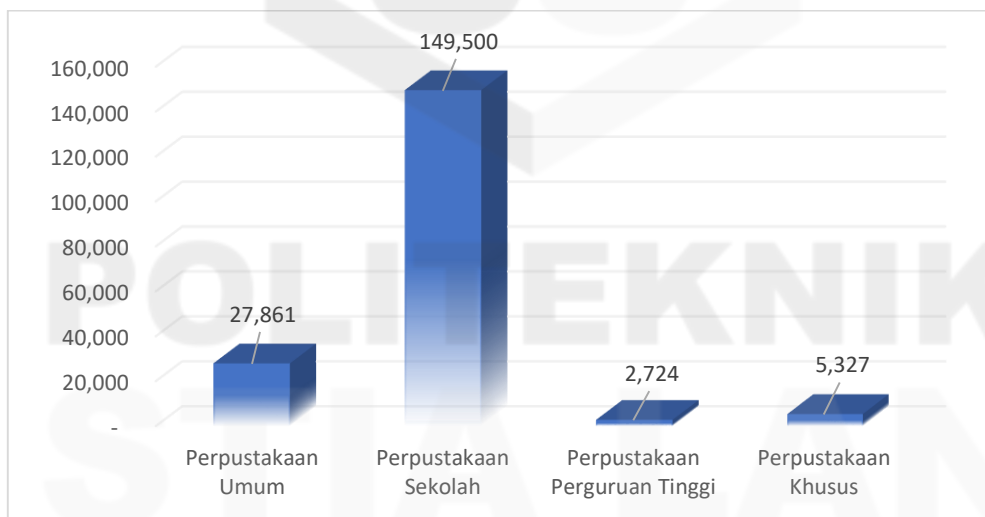
Selain indikator literasi global, tiga indikator literasi nasional: tingkat kegemaran membaca, nilai budaya literasi, dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) relatif masih rendah. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Tahun 2022 baru mencapai 63,90, sedangkan target tahun 2024 sebesar 71 (Perpusnas RI, 2023). TGM meliputi 5 indikator, yaitu: jumlah kegiatan membaca setiap minggu, waktu yang diperlukan untuk membaca setiap hari, jumlah buku yang dibaca setiap 3 bulan, jumlah penggunaan internet dan lama waktu aktivitas akses internet setiap hari. Tingkat kegemaran membaca Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat pertama dengan nilai 72,29 sedangkan Provinsi Papua Barat menempati peringkat terakhir sebesar 54,81.

Nilai budaya literasi Indonesia tahun 2022 baru mencapai 57,40 (Kemendikbudristek, 2023). Dibandingkan dengan target Tahun 2024, sebesar 71,04, masih terdapat selisih sebesar 13,64 poin. Nilai budaya literasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 memperoleh predikat terbaik dengan nilai 80,34, sedangkan posisi terendah ditempati Provinsi Papua dengan nilai 36,03. Hal ini menunjukkan adanya disparitas antarwilayah yang cukup mencolok. Berdasarkan data Perpusnas, IPLM Tahun 2022 baru mencapai 64,48 (kategori sedang). Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh nilai IPLM tertinggi (83,63), sedangkan IPLM terendah adalah Provinsi Papua (20,02). Setidaknya terdapat 3 (tiga) indikator yang menunjukkan nilai IPLM yang masih sedang, yaitu:

1. Infrastruktur dan Akses Literasi

Terkait akses, pada Tahun 2022 baru terdapat 25.960 Perpustakaan Desa/Kelurahan dan 5.327 Perpustakaan Khusus atau Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Dibandingkan dengan jumlah desa yang berjumlah 84.096 desa/kelurahan (Potensi Desa Tahun 2021, BPS) keberadaan perpustakaan atau TBM di desa baru mencapai 37,20%. Selain jumlah perpustakaan yang belum mencukupi, terdapat ketimpangan jumlah perpustakaan antarwilayah. Provinsi dengan jumlah perpustakaan terbanyak didominasi Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah (26.124), Jawa Barat (23.158) dan Jawa Timur (20.080). Sebanyak 85.220 perpustakaan (45,49%) dari 185.412 perpustakaan pada Tahun 2022, terletak di Pulau Jawa (Perpusnas RI, 2023).

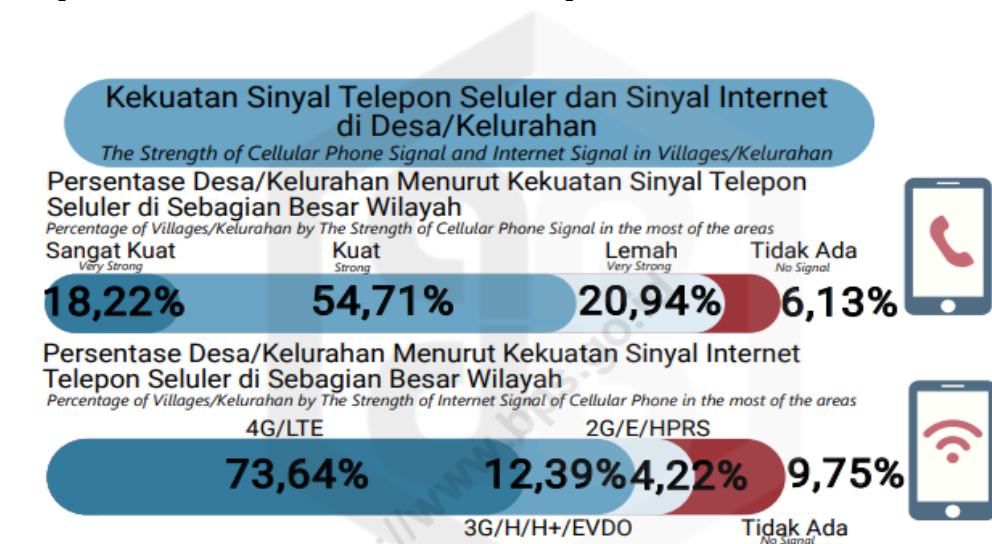
Perpustakaan Sekolah merupakan jenis perpustakaan terbanyak (80,63%), seperti terlihat pada Gambar 1. Perpustakaan Sekolah meliputi Perpustakaan SD/MI sebanyak 100.655, Perpustakaan SMP/MTS sebanyak 29.720, dan Perpustakaan SMA/SMK/MA sebanyak 19.552. Selain Perpustakaan Desa/Kelurahan, perpustakaan umum meliputi Perpustakaan Umum: Provinsi sebanyak 34, Kabupaten/Kota sebanyak 514, dan Kecamatan sebanyak 1.353 (Perpusnas, 2023).



Gambar 1 Jumlah Perpustakaan di Indonesia Tahun 2022

Sumber: Perpusnas RI, 2023.

Pada Tahun 2022 baru 78.897 perpustakaan (42,55%) yang telah dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), yaitu: 77.290 perpustakaan sekolah, 7.676 perpustakaan umum, 1.621 perpustakaan khusus, dan 1.547 perpustakaan perguruan tinggi (Perpusnas, 2021). Selain belum mencukupi dan belum meratanya infrastruktur perpustakaan, keterbatasan akses internet pada beberapa wilayah terutama daerah 3T merupakan kendala tersendiri dalam memanfaatkan konten literasi dalam bentuk digital. Masih terdapat 5.158 desa/kelurahan tidak memiliki sinyal telepon dan 8.203 desa/kelurahan tidak memiliki akses internet. Kekuatan sinyal telepon seluler dan sinyal telepon internet di Desa/Kelurahan terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Kekuatan Sinyal Telepon Seluler dan Sinyal Internet di Desa/Kelurahan

Sumber: Kemenkominfo, 2023.

2. Penyediaan Konten Literasi

Jumlah koleksi perpustakaan pada Tahun 2022 mencapai 26.761.152 (Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Perpusnas, 2023). Berdasarkan standar *The International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA)/UNESCO, setiap orang membutuhkan 2 (dua) koleksi bacaan. Sehingga untuk 270,2 juta jiwa penduduk (Hasil Sensus Penduduk 2020),

maka dibutuhkan 540,40 juta koleksi perpustakaan. Dengan demikian rasio ketercukupan koleksi perpustakaan umum di Indonesia adalah sebesar 0,0495 atau kurang mencukupi (Perpusnas, 2023). Koleksi perpustakaan umum meliputi kategori Ilmu Pengetahuan Sosial (18,2%), Teknologi (15%), Agama (13,3%), Geografi dan Sejarah (12,7%), Sains (8,4%), Bahasa (8,3%), Kesenian (8,3%), Sastra (6,8%), Komputer, Informasi, dan karya Umum (5,1%), serta Filsafat dan Psikologi (3,9%). Koleksi perpustakaan yang paling banyak dipinjam adalah Ilmu Pengetahuan Sosial, Teknologi, Agama, dan Sains (Perpusnas, 2023). Selain penyediaan koleksi cetak, perpustakaan umum juga menyiapkan koleksi digital yang lebih digemari kalangan muda. Berdasarkan data Perpusnas Tahun 2023, sebanyak 70,6% perpustakaan umum memiliki koleksi digital. Untuk mendukung akses koleksi digital tersebut, 82,4% perpustakaan umum daerah telah dilengkapi dengan akses internet.

Untuk menyebarluaskan pemanfaatan akses layanan perpustakaan umum, telah dilakukan sosialisasi budaya literasi di tengah masyarakat melalui sosial media. Tercatat sebanyak 76,50% perpustakaan umum memiliki akun Youtube; 85,30% memiliki akun Facebook; 85,30% memiliki akun Instagram; 44,10% menggunakan Whatsapp; dan 41,20% memiliki akun Twitter. Akun Instagram, Facebook, dan Twitter merupakan media sosial yang banyak dimanfaatkan masyarakat (Perpusnas, 2023).

3. Sumber Daya Manusia (SDM) Literasi

Ketercukupan SDM literasi memiliki peran penting dalam mendampingi pengembangan literasi masyarakat. Acuan yang digunakan untuk mengetahui ketercukupan tenaga perpustakaan adalah standar yang dikeluarkan IFLA/UNESCO. Menurut standar IFLA/UNESCO tahun 2006, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum adalah 1 dibanding 2.500. Ini berarti setiap tenaga perpustakaan dapat melayani 2.500 penduduk. Tahun 2022, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan baru mencapai 1 dibanding 17.978. Artinya setiap tenaga perpustakaan melayani 17.978 penduduk.

Rendahnya literasi berpengaruh pada rendahnya inovasi dan kreativitas masyarakat (Suhardi et al, 2021). Menurut Agus & Heryani (2021), “inovasi dan kreativitas merupakan proses dan produk kegiatan berpikir”. Literasi merupakan kemampuan berbahasa yang dipadukan dengan kemampuan berpikir yang menghasilkan pengetahuan (Kucer, 2014; Agus dan Heryani, 2021). Konteks literasi yang didefinisikan UNESCO pada Tahun 2005 adalah:

Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society.

Berdasarkan definisi literasi di atas, literasi dirumuskan sebagai upaya menginternalisasikan kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan berbagai media (teks tulis/lisan, audio-visual) pada berbagai konteks dengan memperhatikan komunitas/masyarakat beserta nilai-nilai luhur di dalamnya secara santun dan bijak untuk mencapai tujuan.

Rendahnya inovasi dan kreativitas yang merupakan dampak rendahnya literasi terlihat dari peringkat Indonesia pada *Global Innovation Indeks*. Berdasarkan data *World Intellectual Property Organization* (WIPO) Indonesia menduduki peringkat ke-75 dari 132 negara dalam *Global Innovation Indeks 2022*. Posisi Indonesia pada tujuh indikator dalam *Global Innovation Indeks 2022* relatif rendah, yaitu: (i) *institutions* peringkat ke-71; (ii) *human capital and research* peringkat ke-90; (iii) *infrastructure* peringkat ke-68; (iv) *market sophistication* peringkat ke-36; (v) *business sophistication* peringkat ke-92; (vi) *knowledge and technology output* peringkat ke-78; serta (vii) *creative output* peringkat ke-72. Untuk meningkatkan kemampuan literasi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan inovasi dan kreativitas, sejak Tahun 2018 Perpustnas melaksanakan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Melalui TPBIS, perpustakaan tidak saja menjadi ruang belajar kontekstual namun juga menjadi tempat berbagai pengalaman dan ruang berlatih keterampilan kerja untuk peningkatan kualitas hidup.

TPBIS memiliki beberapa tujuan, antara lain meningkatnya kualitas hidup serta masyarakat yang lebih sejahtera. Walaupun memiliki indikator budaya literasi tinggi, namun angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa.

Tabel 2 Indikator Literasi dan Angka Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa

No.	Provinsi	Nilai Budaya Literasi 2020	TGM 2022	IPLM 2022	Angka Kemiskinan 2023
1.	DKI Jakarta	77,35	68,71	80,87	4,44
2.	Jawa Barat	64,82	70,10	72,73	7,62
3.	Jawa Tengah	59,90	70,96	74,36	10,77
4.	DI Yogyakarta	79,01	72,29	83,63	11,04
5.	Jawa Timur	60,19	68,54	74,73	10,35
6.	Banten	61,30	65,70	71,03	6,17
Indonesia		61,63	63,90	64,48	9,36

Sumber: BPS, 2023; Perpustakaan Nasional, 2023.

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa walaupun memiliki indikator literasi relatif tinggi, namun kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta masih rendah. Hal ini merupakan indikator belum berhasilnya implementasi kebijakan TPBIS di Daerah Yogyakarta yang antara lain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan perpustakaan umum dibandingkan jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta baru mencapai 13 perpustakaan umum per 100.000 penduduk (Perpusnas, 2023). Jumlah perpustakaan umum per 100.000 penduduk DIY ini lebih rendah dibanding 12 Provinsi lainnya, yaitu: Bengkulu (37), Jambi (34), Sulawesi Selatan (28), Sulawesi Tengah (26), Kalimantan Selatan (24), Nusa Tenggara Timur (19), Sulawesi Selatan (18), Sumatera Barat (16), Sumatera Utara (16), Kepulauan Bangka Belitung (15), Kalimantan Tengah (15), dan Nusa

Tenggara Barat (14). Berdasarkan data Pertusnas (2023), rasio ketercukupan koleksi perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga masih rendah (0,0431). Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan DIY tersebut, lebih rendah dibandingkan 21 provinsi lainnya, yaitu: Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Bali, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Papua Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara (Perpusnas, 2023).

Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga relatif masih rendah 1 dibanding 11.562 penduduk (Perpusnas 2023). Angka tersebut masih jauh dari rasio ideal berdasarkan standar IFLA (1 dibanding 2.500 penduduk). Tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan juga masih rendah dengan jumlah 50.251 atau baru mencapai 1,37% penduduk (Perpusnas, 2023). Tingkat pemanfaatan perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, juga belum ideal dengan persentase jumlah kunjungan perhari dibagi jumlah penduduk baru mencapai 1,87% sedangkan standar IFLA adalah 2% (Perpusnas, 2023).

Belum berhasilnya implementasi kebijakan TPBIS di Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa indikator ketercukupan sarana dan prasarana literasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih rendah menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian terkait Implementasi TPBIS di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi (16,39 tahun 2022) dan Kabupaten Sleman yang merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan terendah (7,74 tahun 2022). Implementasi kebijakan merupakan tahapan kelima setelah identifikasi masalah, agenda setting, formulasi kebijakan, dan legitimasi kebijakan (Dye dalam Tazkia & Cadith, 2022). Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh Dunn, 2004, yang mengemukakan siklus kebijakan dimana implementasi kebijakan merupakan tahapan keempat setelah adopsi kebijakan.

Berbagai teori tentang implementasi kebijakan muncul untuk menganalisis bagaimana kebijakan dilaksanakan. Beberapa teori implementasi kebijakan, antara lain: (i) Van Meter & Van Horn (1975) yang mengemukakan enam variabel yang memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan; (ii) Edward III dalam *Implementing Public Policy* 1980, yang mengemukakan empat variabel yang memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan; (iii) Grindle, 1980 yang mengemukakan konten dan konteks kebijakan; serta (iv) Mazmanian dan Sabatier (1983), yang mengemukakan bahwa tahapan (variabel dependen) dalam implementasi kebijakan mulai dari output kebijakan dari lembaga pelaksana, ketaatan atau kepatuhan pada output kebijakan dan kelompok sasaran, dampak nyata dari output kebijakan, dampak yang dirasakan, dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan. Variabel dependen tersebut dipengaruhi oleh karakteristik masalah (empat variabel), karakteristik kebijakan atau undang-undang (tujuh variabel), dan variabel di luar kebijakan (enam variabel). Teori implementasi kebijakan perlu disesuaikan dengan teori baru terkait dengan implementasi kebijakan peningkatan literasi agar relevan dengan kondisi saat ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang, peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Tingkat literasi yang tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan dimana angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa;
2. Ketersediaan perpustakaan umum dibandingkan jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta masih rendah;
3. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih rendah;
4. Kurangnya SDM bidang perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih rendah;

6. Tingkat pemanfaatan perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta belum ideal.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti merumuskan permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan TPBIS di Daerah Istimewa Yogyakarta belum optimal?
2. Bagaimana strategi yang digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan TPBIS di Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti menetapkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan TPBIS di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Strategi implementasi kebijakan TPBIS di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, terdapat dua manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk memperkaya teori ilmu administrasi publik terutama terkait implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti isu bidang literasi dan isu terkait lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan strategi implementasi kebijakan TPBIS yang dapat diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini, antara lain:

1. Faktor determinan yang mempengaruhi implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:
 - a. Standar dan sasaran kebijakan: pelaksanaan implementasi kebijakan TPBIS oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman masih mengacu pada SOP dari Perpustakaan Nasional melalui Peraturan Perpustakaan Nomor 3/2023 tentang TPBIS. Belum adanya Peraturan Daerah tentang TPBIS mengakibatkan belum adanya standar dan sasaran kebijakan level daerah sebagai pedoman pelaksanaan TPBIS yang dapat mensinergikan peran lintas pemangku kepentingan di daerah.
 - b. Sumber daya organisasi: Terbatasnya anggaran dan belum mencukupinya SDM perpustakaan merupakan kendala implementasi kebijakan TPBIS. Minimnya alokasi anggaran mengakibatkan minimnya replikasi program TPBIS, serta pemenuhan sarana dan prasarana perpustakaan. Kurangnya SDM perpustakaan mengakibatkan tidak ada spesifikasi kerja serta berpengaruh pada pelaksanaan TPBIS.
 - c. Komunikasi antarorganisasi dan pengukuran aktivitas: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo telah memiliki tim sinergi dari gabungan dinas OPD yang ada dimana masing-masing kepala dinas menjadi tim sinergi program TPBIS. Hal senada juga dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Namun rutinitas komunikasi masih kurang dan belum fokus pada pembahasan keberlanjutan program TPBIS.

- d. Karakteristik birokrasi pelaksana: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam implementasi TPBIS. Namun pada tataran staf pelaksanaan, belum memiliki spesifikasi pekerjaan yang diakibatkan kurangnya SDM perpustakaan. Perubahan orientasi pimpinan menjadi kendala tersendiri dalam implementasi TPBIS. Perpustakaan sebagai urusan wajib daerah namun bukan prioritas menyebabkan dukungan alokasi anggaran daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan relative kecil.
- e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik: karakteristik masyarakat desa yang menjadi peserta program TPBIS di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman berstatus petani, peternak, perikanan dan UMKM dan status pendidikan rata-rata setara SLTA. Pendidikan yang relatif masih rendah menjadi kendala tersendiri dalam implementasi TPBIS.
- f. Pemanfaatan teknologi: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menyediakan fasilitas wifi, komputer, konten digital, serta pendampingan kepada masyarakat guna memanfaatkan aplikasi *meet zoom* dan penggunaan *platform e-commerce*.
- g. Partisipasi masyarakat: Sudah ada masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan layanan perpustakaan, namun sebagian besar masyarakat masih berperan sebagai peserta pelatihan TPBIS.
- h. Sikap pelaksana: Masih terdapat sikap pro dan kontra terhadap program TPBIS. Sikap kontra didasari oleh ketidakpercayaan terhadap keberhasilan program TPBIS. Untuk meningkatkan komitmen dari para pelaksana masih menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang hasilnya disampaikan langsung kepada Gubernur.
- i. Kinerja kebijakan: belum ada ukuran tingkat keberhasilan program TPBIS. Keberhasilan baru dinilai dari masyarakat desa yang mau berusaha setelah mengikuti program TPBIS.

2. Strategi implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi: peningkatan komitmen pimpinan, penyusunan regulasi yang dapat menjadi payung hukum pelaksanaan TPBIS di daerah, pembentukan tim koordinasi untuk mengintegrasikan program-program yang memiliki relevansi tujuan sama dengan kebijakan TPBIS, penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD), serta evaluasi dan monitoring secara berkala.

B. Saran

Berdasarkan informasi yang diperoleh, untuk memperbaiki implementasi kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, peneliti menyarankan:

1. Pemerintah Pusat perlu mendorong dan memfasilitasi sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan budaya literasi untuk meningkatkan kecakapan hidup dan kesejahteraan masyarakat, antara lain:
 - a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu terus mendorong dan memfasilitasi penyusunan Peraturan Perundang-Undangan untuk memayungi sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan budaya literasi. Untuk hal ini, Peta Jalan Pembudayaan Literasi yang telah dihasilkan pada Tahun 2021 sebagai wadah sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, perlu dibuat payung hukumnya melalui Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) yang dilaksanakan Kemendikbud.
 - b. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) perlu menjalin kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya untuk menjamin keberlanjutan program TPBIS. Peserta pelatihan TPBIS perlu difasilitasi dengan pelatihan dan pendampingan dari program lainnya terutama terkait pemasaran, kemasan, dan akses permodalan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan orientasi pasar. Perpusnas juga perlu terus melaksanakan berbagai forum *stakeholder meeting* yang dinilai masih kurang, untuk

memperoleh dukungan pelaksanaan TPBIS dari berbagai pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, Parlemen, Swasta, Perguruan Tinggi, Masyarakat, dan Media).

- c. Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu memastikan SDG's Desa, khususnya Tujuan ke-4: Pendidikan Desa Berkualitas dapat terlaksana dengan baik. Pemanfaatan dana desa untuk pengembangan dan operasionalisasi Perpustakaan Desa perlu terus dikawal. Kegiatan literasi di tingkat desa, perlu didisintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di desa.
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah sebagai payung hukum kolaborasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Peraturan Daerah tersebut perlu memuat Rencana Aksi Daerah dan Tim Koordinasi Pelaksanaan TPBIS. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi maupun Kabupaten Kota perlu terus melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan TPBIS dapat berjalan dengan baik.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TPBIS perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan berjenjang, oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas terkait. Hal ini, untuk memastikan tujuan program dapat tercapai dan kendala dalam pelaksanaan dapat ditangani lebih dini.
4. Kepala Desa/Lurah perlu memastikan pelaksanaan program TPBIS di wilayahnya berjalan dengan baik, sehingga memiliki dampak pada peningkatan kecakapan hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pola komunikasi baik formal maupun informal perlu terus dijalin untuk memudahkan pelaksanaan program dimaksud.
5. Masyarakat desa baik melalui kelompok maupun individu, serta para pegiat literasi sebagai peserta dari program TPBIS diharapkan dapat lebih

meningkatkan partisipasinya dalam mensukseskan kebijakan ini. Masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan program TPBIS. Dengan mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat maka para pembuat kebijakan akan membuat program dan kegiatan yang diarahkan kepada kebutuhan tersebut sehingga *output* dari kebijakan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kerjasama antara pemerintah dan partisipasi masyarakat desa, selain dapat mengawasi program dapat berjalan mestinya juga mendorong pemangku kepentingan untuk komitmen agar kebijakan TPBIS tetap berkelanjutan.

6. Mengingat bahwa penelitian ini hanya memfokuskan pada pelaksanaan implementasi kebijakan TPBIS di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, maka bagi para peneliti selanjutnya agar menambahkan jumlah pengamatan sampel di daerah lainnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan holistik. Selain itu, model implementasi kebijakan publik lainnya juga dapat digunakan untuk melengkapi dan memperkaya hasil dari penelitian ini. Hasil penelitian dalam karya ilmiah Tesis ini bukan bersifat mutlak untuk kondisi pelaksanaan implementasi kebijakan TPBIS di Daerah Istimewa Yogyakarta mengingat terbatasnya key informan sebanyak 11 orang. Oleh sebab itu, agar memperoleh hasil penelitian yang lebih merepresentasikan kondisi riil pada penelitian selanjutnya, maka jumlah narasumber kunci yang menjadi responden dalam penelitian perlu diperbanyak terutama dari masyarakat penerima manfaat, sehingga setiap pemangku kepentingan di daerah dapat terwakili.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Y. 2018. *Pembelajaran Literasi Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematika, Sains, Membaca dan Menulis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahuja, P., Ahuja, G. 2010. *Membaca Secara Efektif dan Efisien*. Bandung: PT Kiblat Buku Utama.
- Agranoff, R., Mac Guire, M. 2003. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washington DC: Georgetown Univ Press.
- Allison., Allison. 2004. *Perencanaan Strategi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Alter., Hage. 1993. *Organization Workings*. Jakarta: Kiblat Buku Utama.
- Bernstein. 1976. *The Restructuring of Social and Political Theory*. London: Methuen & Co Ltd.
- Buttler., Coleman. 2005. *Manajemen Strategis, Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Kanisius.
- Cen, C. 2022. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Chambers, R. 2003. *Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Choi. 2014. *Reframing Organizations: Artistry and Leadership*. New York: Jossey Bass.
- Dalman. 2014. *Keterampilan Membaca*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dewi, D., Siti, H., Vidya, Y., Riska, S. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Suhardi et al, 2021. *Peta Jalan Pembudayaan Literasi*.
- Dye. 2017. *Understanding Public Policy revel Access Code*. New York: Pearson.
- Dwiyanto, A. 2021. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Farazmand, A. 2004. *Administrative Reform in Developing Nation*. London: Praeger.
- Fraser, D., Cooper, M. 2020. *Buku Saku Praktik Klinik Kebidanan*. Jakarta: EGC.
- Gastil, J., Levine, P. 2005. *The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st Century*. San Francisco: Jossey Bass.
- Gramedia, 2018. 7 Tokoh Dunia Ini Mengawali Sukses Dari Baca Buku
- Grindle S. Merilee, 1980. *Policy Content and Context in Implementation*. Princeton University Press.
- Gong, A., Irkham, M. 2012. *Gempa Literasi*. Jakarta: Kepustakaan Gramedia Populer.
- Hadi, S. 2021. *Metode Research III*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamid, H. 2020. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Hill M. and Hupe P., 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*.
- Hutagalung, S., Dedy, H. 2018. *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Indriani 2022. Program TPBIS Dinilai Mampu Sejahterakan Masyarakat. Antara News.
- Innes, J., Booher, D. 2010. *Collaborative Policy Making: Governance Through Dialogue. In Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jessop, B. 1990. *Liberalism, Neoliberalis and Urban Governance: A State Theoretical Concept*, Blackwell Publishers. Oxford.
- Jumadi., Sutjipto., Ivan, H., Suryadi. 2022. *Pendidikan Karakter: Program, Evaluasi dan Implementasinya*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Karmanis., Karjono. 2022. *Buku Pedoman Belajar Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CV. Pilar Nusantara.
- Kertati, I., Harsono., Setyohadi, P., Bambang, A. 2023. *Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu ke Hilir*. Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

- Kurniawan, A., Iwan, N. 2023. *Audit Kinerja Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Lyn, L., Heinrich, J., Hill, C. 2011. *Improving Governance: A New Logic for Empirical Research*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Ma, 2019. *Sejarah Perkembangan Administrasi sebagai seni dan Ilmu Pengetahuan*.
- Mainka A., Castelnovo W., Miettinen V., Petersen SB., Hartmann S., Stock WG., 2016. *Open Innovation In Smart Cities: Civic Participation and Co-Creation Of Public Service*
- Malekpour, S., Sylvia, T., Chris, C. 2021. *Designing Collaborative Governance for Nature-Based Solutions. Urban Forestry and Urban Greening*. 62 (1): 1-13.
- Mazmanian D., Sabatier P., 1983. *Implementation and Public Policy: With a New Postscript*. University Press of America.
- Milles, M., Huberman, M., Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook) Edition 3*. United State of America: SAGE Publications, Inc.
- Mukhtar., Ahmad, S., Sakban. 2023. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Standar Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah/Madrasah*. Jambi: Salim Media Indonesia (Anggota IKAPI).
- Mukhtar, H., Hapzi, A., Mardalena. 2016. *Efektivitas Pimpinan: Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muniati, J., Hana, P., Hora, T. 2020. *Dua Sisi Mata Uang: Pemimpin dan Perubahan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mursyid, M. 2016. *Membumikan Gerakan Literasi di Sekolah*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.
- Muttaqin, M., Usman, I., Ilham. 2021. *Diskursus dan Dinamika Administrasi Publik: Tinjauan Kritis dan Reflektif*. Bandung: Wawasan Ilmu.
- Nimran, U. 2022. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Nugroho, R. 2021. *Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Kontemporer*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurdin, I. 2017. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

- Nurhadi. 2010. *Membaca Cepat dan Efektif*. Bandung: Sinar Baru.
- Osborne, D., Gabler, T. 1992. *Mewirauahakan Birokrasi*. Jakarta: Pustaka Binama Pressindo.
- Palermo., Peterman. 2011. *Decreased Quality of Life Associated with Obesity in School-Aged Children*. *Arch Pediatr Adolesc*. 157 (1): 206-211.
- Pamungkas, B. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah: Konsep dan Praktek Berdasarkan Peraturan Perundangan Jilid I*. Bandung: Kesatuan Press.
- Panggabean, H., Hora, T. 2014. *Pemimpin dan Perubahan-Langgam Terobosan Profesional Bisnis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prasetyia, F., Farah, W. 2021. *Analisis Kebijakan Publik: Pendekatan Ekonomi dan Studi Kasus*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Prasetyono, D. 2008. *Rahasia Mengajarkan Gemar Membaca Pada Anak Sejak Dini*. Yogyakarta: Think.
- Purwanto, E., Dyah, R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jogyaakarta: Gave Media.
- Quade, E. 1989. *Analysis for Public Decisions 3rd Edition*. North Holland.
- Rahayu, A.Y.S., Juwono, V., 2019. *Birokrasi dan Governance: Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. Rajawali Pers.
- Raja, D., Piki, D. 2021. *Administrasi Publik*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Rhodes, R. 1997. *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexity and Accountability*. Open University Press.
- Rulitawati., Husein, R., Lias, H. 2020. *Model Pengelolaan Kinerja Guru*. Palembang: Tunas Gemilang Press.
- Sabatier P., 1986. *Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis*. *Journal of Public Policy*.

- Salampeppy, M., Didik, S., Romi, M., Ul, Q. 2023. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CV. Gita Lentera.
- Samudra, A., Andriansyah., Agus, S. Muh, K. 2023. *Impementasi Kebijakan Publik dan Evidence-Base Policy*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Sardjoko, S. 2018. *Kebijakan Pembangunan Perpustakaan untuk Peningkatan Kesejahteraan dalam RKP 2019*.
- Sari, D., Robert, T., Martoo, S., Marisi, B., Heri, P. 2020. *Manajemen Pemerintahan*. Gorontalo: Ikeas Publishing.
- Septiana, A., Suprpto., Amtai, A., Ahmad, M. 2023. *Kebijakan Politik: Teori, Formulasi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Global Eksekutif Teknologi.
- Silitonga, D. 2022. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Purwokerto: CV. ZT Corpora.
- Silvia, I. 2019. *Nilai Perusahaan Melalui Kualitas Laba (Good Governance dan Kebijakan Perusahaan)*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka.
- Soekanto, S. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solimun., Armanu., Adji, A. 2018. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Solong, A., Asri, Y. 2021. *Kajian Teori Organisasi dan Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suaib. 2023. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Indramayu: CV Adanu Abimata.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Supriyadi. 2022. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Cipta Media Nusantara.
- Surachman, E., Maman, S., Sakti, P., Dian, H. 2020. *Dinamika Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Suwanto., Henry, E., Retno, A. 2019. *Pimpinan dan Kepemimpinan dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syahrudin. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: CV Hikam Media Utama.
- Tilaar, H. 1999. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Rosdakarya.
- Tim Penyusun. 2021. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Program Magister Terapan, Program Studi Administrasi Pembangunan Negara*. Jakarta: Politeknik STIA LAN
- Tjasmadi, M. 2021. *Menjadi Belia Pemimpin*. Bandung: Epiraf Komunikata Prima.
- Tjilen, A. 2019. *Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Teknik Analisis Implementasi*. Bandung: Nusa Media.
- Tohardim A. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Kalimantan Barat: Tanjungpura University Press.
- Trianto dan Heryani, 2021. *Literasi 4.0: Teori dan Program*. Rajawali Pers.
- Tyoso, J. 2021. *Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Sistem Pengendalian Manajemen Pada Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah di Jawa Tengah*. Semarang: Butterfly Mamoli Press.
- Usman, H., Setiyadi, P. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Van Meter & Van Horn, 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration & Society.
- Wahab, A., Solichin. 2017. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaya, L. 2014. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- William N. Dunn, 1994. *Public policy Analysis: An Introduction Second Edition*. University of Pittsburgh.
- World Intellectual Property Organization (WIPO), *Global Innovation Indeks 2022*.
- Yasmin, A. 2016. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik*. Jakarta: EGC.

Yeh, S.T., and Walter, Z. 2016. *Critical Success Factors for Integrated Library System Implementation in Academic Libraries: A Qualitative Study*. Information Technology and Libraries. September 2016.

Yuliana, L., Suharsimi, A. 2008. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Teras.

Yusuf, M., Syarif, D. 2018. *Komitmen Organisasi: Definisi, Dipengaruhi dan Mempengaruhi*. Makassar: Nas Media Pustaka.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik (Edisi Pertama)*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Jurnal

Adha, R.P., Koeswara, H., Aromatica, D. 2022. Implementasi Kebijakan Perpustakaan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Minat Baca Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. XX, No. X, 2022.

Aaltonen, K., Virpi, T. 2022. *Institutionalization of a Collaborative Governance Model to Deliver Large, Inter-Organizational Projects*. *International Journal of Operations and Production Management*. 42 (8): 1294-1328.

Agbodzakey. 2011. *Collaborative Governance of HIV Health Services Planning Councils in Broward and Palm Beach Countries of South Florida*. *Journal Springer Science Business Media*.

Ali T., Implementasi Pembelajaran Inkuiri Terstruktur Untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa. *Jurnal Ilmiah Pro Guru*, Vol. 7 No. 1, Januari 2021.

Ansell, C. 2014. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance*. 13 (1): 1-30.

Ashiq, M., Farhat, J., Khalid, M. 2022. *Transformation of Libraries During Covid-19 Pandemic: A Systematic Review*. *The Journal of Academic Librarianship*. 48 (1): 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2022.102534>.

Aziza, P., Muhammad, R., Fridinanti, Y. 2022. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Merangin dalam Mengembangkan Produktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Berbasis Inklusi Sosial. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*. 28 (1): 40-51.

- Bingham., O'Leary. 2008. *Legal Framework for Governance and Public Management. Big Ideas in Collaborative Public Management*. 247-269.
- Booher, D., Judit, I. 2004. *Network Power in Collaborative Planning. Journal of Planning Education and Research*. 21 (1): 221-236.
- Bouaamri, A. 2023. *The Roles of Public Libraries in Enhancing Educational Systems and Social Inclusion in Africa. Prospects*. 12 (1): 1-7. <https://doi.org/10.1007/s11125-023-09670-9>.
- Burhan N., Nurchasanah, Basuki I., 2020. Implementasi Tahap Pembiasaan Gerakan Literasi Sekolah. *Jurnal Pendidikan*, Vol. 5, No. 3, Maret 2022, Hal 367-373.
- Bruno, M. 2020. *The Challenge of the Bycyle Street: Applying Collaborative Governance Process While Protecting User Centered Innovations. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*. 7 (1): 1-13.
- Bryson, J., Crosby, B., Stone, M. 2006. *Designing and Impementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. Public Administration Review*. 75 (1): 647-663.
- Cigarini, A., Isabelle, B., Julian, V., Josep, P. 2021. *Public Libraries Embrace Citizen Science: Strength and Challenges. Library and Information Science Research*. 43 (1): 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2021.101090>.
- Criado, J., Ariana, G. 2020. *Public Sector, Open Innovation, and Collaborative Governance in Lockdown Times. A Research of Spanish Cases During the Covid-19 Crisis. Transforming Government: People, Process and Policy*. 15 (4): 612-626.
- Dadhich, M., Rao, S.S., Sethy, S., Sharma, R. 2021. *Determining the Factors Influencing Cloud Computing Implementation in Library Management System (LMS). Library Philosophy and Practice (e-journal)*. 6281.
- Dapilah, F., Jonas, O., Karen, L., Sarah, A. 2021. *He Who Pays the Piper Calls the Tune: Understanding Collaborative Governance and Climate Change Adaptation in Northern Ghana. Climate Risk Management*. 32 (1): 1-15.
- Djiko, R., Arimawa, P.S., Tangkau, C.H.S. 2018. Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Halmahera Utara. Publisia: *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018.

- Emerson, K., Nabatchi, T., Balogh, S. 2012. *An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory*. 22 (1): 1-29.
- Erdiyansyah. 2022. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 13, No. 1, 2022.
- Feller, J., Finnegan, P., Nilsson, O. 2011. *Open Innovation and Public Administration Transformational Typologies and Business. European Journal of Information System (2011) 20*, 358-374.
- Folke, C., Hahm, T., Olsson, P., Norberg, J. 2005. *Adaptive Governance of Social Ecological Systems. Annual Review of Environment and Resources*. 30 (1): 441-473.
- Futrell, R. 2003. *Technical Adversarialism and Participatory Collaborative in the U.S Chemical Weapons Disposal Program. Science, Technology and Human Values*. 28 (1): 451-482.
- Godin, M. 2010. *Acute Renal Failure and Fanconi Syndrome Due to Deferasirox. Nephrol Dial Transplant*. 25 (1): 2376-2378.
- Hafel, M., Julfi, J., Mohbir, U., Anfas. 2021. *Collaborative Governance Between Stakeholders in Local Resource Management in North Maluku. Journal of Hunan University*. 48 (4): 83-87.
- Handayani, T. 2020. Penguatan Budaya Literasi Sebagai Upaya Pembentukan Karakter. *Jurnal Literasi*. 4 (1): 67-69.
- Haris, R.A. 2017. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sumenep. *Publisia*, Volume 2, nomor 2, Oktober 2017.
- Haryanto, H. 2020. Penerapan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Perguruan Tinggi Melalui Literasi Kewirausahaan dan Entrepreneur Corner. *Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia)*. 5 (1): 217-224.
- Henna, S., Maria, A. 2022. *Collaborative Governance as a Means of Navigating the Uncertainties of Sustainability Transformations: The Case of Finish Food Packaging. Ecological Economics*. 197 (1): 1-11.
- Heikkila, T., Gerlak, K. 2005. *The Formation of Large-Scale Collaborative Resource Management Institutions: Clarifying the Roles of Stakeholders, Sciences and Institutions. Policy Studies Journal*. 33 (1): 583-612.

- Hidi, S. 2001. *Interest, Reading and Learning: Theoretical and Practical Consideration. Educational Psychology Review*. 13 (3): 1-10.
- Hobfoll, S. 2001. *The Influence of Culture, Community and the Nested-Self in the Stress Process: Advancing Conservation of Resources Theory. Applied Psychology*. 50 (3): 337-421.
- Huxam, C., Vangen, S. 2000. *Leadership in the Shaping and Implementation of Collaboration Agendas: How Things Happen in a (not Quite) Joined-up World. Academy of Management Journal*. 43 (1): 1159-1175.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78/P/2019 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Gerakan Literasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019.
- Kusmayadi, N. W., Hertati, D. 2022. Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 13, No. 2, 2022.
- Kurniasih, I., Rahmat, S. 2021. Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan di Perpustakaan Daerah Karanganyar. Lentera Pustaka: *Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*. 7 (2): 149-160. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v7i2.34599>.
- Leach, W., Pelkey, N., Sabatier, P. 2002. *Stakeholder Partnerships as Collaborative Policy Making: Evaluation Criteria Applied to Watershed Management in California and Washington. Journal of Policy Analysis and Management*. 21 (1): 645-670.
- Li, B., Jiwei, Q., Juan, X., Yiran, L. 2022. *Collaborative Governance in Emergencies: Community Food Supply in Covid-19 in Wuhan, China. Urban Governance*. 1 (1): 1-9.
- Lubis, S. 2020. Membangun Budaya Literasi Membaca dengan Pemanfaatan Media Jurnal Baca Harian. *PIONIR: Jurnal Pendidikan*. 9 (1): 127-135.
- Maharani, W. K., Sukardi. 2016. Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Kota Blitar. *Publisia*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016.
- Mahdi, R., Muakibatul, H., Andi, A. 2020. *Social Inclusion-Based Library Transformation: A National Library of Indonesia's Role to Support Development Goals (SDG's). Library Philosophy and Practice*. 12 (1): <https://digitalcommons.unl.edu/libphiprac/6028>.

- Milward, H., Provan, K. 2000. *Do Networks Really Work: A Framework for Evaluating Public-Sector Organizational Networks* *Public Administration Review*. 61 (4). 18-31.
- Muslimin. 2018. Penumbuhan Budaya Literasi Melalui Peningkatan Minat Baca Masyarakat Desa. *Cakrawala Pendidikan*. 7 (1): 107-118.
- Nashihuddin, W., Suryono, F. 2018. Tinjauan Terhadap Kesiapan Pustakawan dalam Menghadapi Disrupsi Profesi di Era Library 4.0: Sebuah Literatur Review. *Khazanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*. 6 (2): 86-97.
- Novanto, H.E., Wibawani, S. 2023. Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.14, No.2, 2023.
- O'Leary., Vij, N. 2012. *Collaborative Public Management: Where Have We Been and Where are We Going?* *The American Review of Public Administration*. 42 (5): 507-522.
- Pacadi, F., Sholahuddin, A., Prianto B. 2020. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Pada pasar desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran kabupaten Malang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 5 (2) 2020.
- Panda, S., Subarna, K. 2023. *Role of Public Libraries in Promoting Peace and Social Cohesion Through United Nation's Sustainable Development Goals (SDG): with Special Reference to Azadi ka Amrit Mahotsav*. *College Libraries*. 38 (1): 70-77.
- Pasaribu, A. 2018. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Era Digital Terhadap Kesejahteraan. *Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia*. 2 (2): 1-10.
- Plotnikof, M. 2015. *Negotiating Collaborative Governance Designs: A Discursive Approach*. *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*. 20 (3): 1-22.
- Pratiwi, E., Heriyanto, H. 2022. *Social-Inclusion-Based Library Transformation Program*. *Library Philosophy and Practice*. 1 (3): 1-13. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/6705>.
- Provan, K., Kenis, B. 2008. *Do Networks Really Work? A Framework for Evaluating Public-Sector Organizational Networks*. *Public Administration Review*. 61 (1): 414-423.

- Putong, L.B., Wahyudi, K.E. 2022. Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 13. No. 4, 2022
- Qois, Z., Rina, T., Shiddieq, A. 2023. Transformative Librarian: Strategi Transformasi Perpustakaan Bank Indonesia dalam Mewujudkan Librarian 4.0. *Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia)*. 8 (1): 43-60.
- Raharjo, Mudjia. 2008. Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Animal Genetic*. 39 (5): 561.
- Rachman, A., Sugiana, D., Rohanda, H. 2019. Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Sejahtera (Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang). *Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjajaran* 2019, Februari, 2 (3): 907-918.
- Robert, E., Weber, E. 2000. *Thinking Harder About Outcomes for Collaborative Governance Arrangements. American Review of Public Administration*. 40 (5): 546-567.
- Ruijter, E. 2021. *Designing and Implementing Data Collaborative: A Governance Perspective. Government Information Quarterly*. 38 (1): 1-12.
- Sadli, M. 2019. Analisis Pengembangan Budaya Literasi dalam Meningkatkan Minat Membaca Siswa di Sekolah Dasar. *TERAMPIL: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*. 6 (2): 151-164.
- Saputro, A. 2018. Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 2 Bantul. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPPTMA)*. 1 (2): 82-93.
- Shauma, N. U., Purbaningrum, D. G. 2022. Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 13, N0. 2, 2022.
- Sherra, S., Jorge, R. 2023. *Social Inclusion of Refugees and Asylum Seekers: The Role of Public Libraries in The Lisbon Metropolitan Area. Journal of Librarianship and Information Science*. 3 (1): 1-18. <https://doi.org/10.1177/09610006221146549>.
- Stoker, G. 1998. *Governance as Theory: Five Positions. International Social Science Journal*. 50 (1): 17-28.
- Temmerman, L., Carina, V., Pieter, B. 2020. *Collaborative Governance Platform for Social Innovation in Brussels. Social Enterprise Journal*. 17 (2): 165-182.

- Thomson, A., Perry, J. 2006. *Collaborative Processes: Insiden the Black Box. Public Administration Review*. 66 (1): 20-32.
- Ulla, I., Dong-Young, K. 2020. *A Model of Collaborative Governance for Community-Based Trophy-Hunting Programs in Developing Countries. Perspectives in Ecology and Conservation*. 18 (1): 145-160.
- Wahyuni, S., Ahmad, P. 2017. Optimalisasi Budaya Literasi Melalui Program *Journaling-Feedback. International Conference on Language, Literature and Teaching*. 7 (1): 938-944.
- Wahyuningsih, E., Nathasia, M., Rining, N. 2020. Model Peningkatan Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintah di Indonesia. *Jurnal of Sosial Ekonomi dan Politik*. 1 (1): 1-15.
- Wibawa, S., Darulfa, A. 2020. *Collaborative Governance in Achieving Sustainable Development Goals: A Conceptual Framework. Jiapi: Jurnal Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*. 1 (1): 35-42.
- Wijayanto, H., dan Hidayati, R.K. *Publisia*, Volume 2, Nomor 1, April 2017.
- Wulansari, A., Lilis, S., Aldo, R., Sigit, D. 2021. Dampak Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusional Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Publis*. 5 (2): 34-48. ISSN.2598-7852.
- Ylipulli, J., Matti, P., Nils, E., Turkka, K. 2023. Public Libraries as a Partner in Digital Innovation Project: Designing a Virtual Reality Experience to Support Digital Literacy. *Future Generation Computer Systems*. 149 (1): 594-605. <https://doi.org/10.1016/j.future.2023.08.001>.
- Yosvidar I., 2016. Implementasi Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Dalam Membangun Literasi Media di Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2016, hlm 95-105.
- Zheng, L. 2022. *Collaborative Governance of Haze Pollution Between Local Governments. Alexandria Engineering Journal*. 1 (1): 1-11.

Laporan Publikasi/Regulasi

Badan Pusat Statistik, Potensi Desa Tahun 2021.

Benavot, A. 2015. *Literacy in the 21st Century: Towards a dynamic nexus of social relations*. © Springer Science+Business Media Dordrecht and UNESCO Institute for Lifelong Learning 2015.

Kemendikbudristek, Indeks Pemajuan Kebudayaan Tahun 2018-2021.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perpustakaan

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Laporan Kajian Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan